



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 26 Oktober 2016

Halaman: 1

Kawasan Alun-alun Steril dari APK

SELAIN pengambilan nomor urut pasangan, KPU Kota Yogya juga mengumumkan beberapa hal terkait pelaksanaan Pilwakot.

Satu di antaranya adalah menetapkan kawasan Alun-alun Utara dan Selatan harus steril dari Alat peraga Kampanye (APK). (*)

Hal 11

1

PILKADA KOTA YOGYA

NOMOR URUT 1

Calon Wali Kota : Imam Priyono
Calon Wakil Wali Kota : Acmad Fadli
Partai Pengusung :
PDI Perjuangan : (15 kursi)
Nasdem : (1 kursi)
PKB : -



2

NOMOR URUT 2

Calon Wali Kota : Haryadi Suyuti
Calon Wakil Wali Kota : Heroe Poenwadi

Partai Pengusung :
Partai Golkar : 5 kursi
PKS : 4 kursi
Demokrat : 1 kursi
PAN : 5 kursi
Gerindra : 5 kursi
PPP : 4 kursi



Pilkada Kota Yogya Tanpa Konvoi Motor

■ Alun-alun Utara dan Selatan Harus Steril dari APK

YOGYA, TRIBUN - Pasangan Calon (Paslon) yang akan bertanding di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Yogyakarta 2017, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi (HS-HP) dan Imam Priyono-Achmad Fadli (IP-AF) berjanji saat kampanye terbuka, tak ada konvoi sepeda motor.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) meminta KPU meniadakan kampanye terbuka dalam Pilwalkot. Selain rentan terjadi gesekan antar pendukung, juga dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat seperti kasus di Pilkada Sleman 2015.

"Kami akan menjunjung tinggi ketenteraman masyarakat saat kampanye. Salah satunya dengan tidak melakukan konvoi kendaraan," ujar Haryadi usai melakukan pengundian nomor urut di kantor KPU Kota Yogyakarta, Selasa (25/10).

Seperti diketahui dalam pengundian nomor urut di kantor KPU Kota Yogyakarta, paslon HS-HP memperoleh nomor urut 2. Sementara paslon IP-AF mendapat nomor urut 1. Bagi HS, berapapun nomor urut yang diperoleh wajib disyukuri dan memiliki makna tersendiri.

"Tidak apa-apa nomor 2. Nomor 2 bermakna syahadat. Selain itu, nomor 2 merupakan bentuk kesempurnaan dan keseimbangan.


Masukan dari masyarakat, paslon tidak perlu menggelar kampanye terbuka. Tapi realisasinya, kami serahkan ke masing-masing paslon

Sebab Allah menciptakan siang dan malam agar hamba-hambanya bertawakkal," ucapnya.

Senada, Imam Priyono mengaku dalam kampanye Pilwalkot, pihaknya akan meminta seluruh pendukungnya tidak menggunakan sepeda motor yang mengganggu ketertiban masyarakat. Jika terdapat pendukung yang melanggar, dia mengaku akan menindak tegas.

"Kampanye yang akan kami lakukan adalah kampanye berbudaya, tidak ada kampanye bermotor yang berpotensi mengganggu masyarakat," tegasnya.

IP menambahkan ketika memperoleh nomor urut 1, pihaknya bersyukur. Sejak awal, pendukungnya berharap IP-AF memperoleh no-

mor urut 1. Sebab nomor 1 dipandang melambangkan persatuan dan kesatuan yang diharapkan menyatukan seluruh elemen.

Pemasangan APK

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto menambahkan usai melakukan pengundian nomor urut paslon, Pilwalkot memasuki tahapan kampanye. Berdasar kalender KPU, masa kampanye akan dimulai pada 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 mendatang.

"Masukan dari masyarakat, paslon tidak perlu menggelar kampanye terbuka. Tapi realisasinya, kami serahkan ke masing-masing paslon," ucapnya.

Dia mengungkapkan selama masa kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta nomor 89/2016. Di Perwal itu, APK tak boleh dipasang di 7 ruas jalan protokol dan 4 bangunan budaya di Kota Yogyakarta.

Adapun 7 ruas jalan tersebut ialah Jalan Laksda Adisucipto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Cik Di Tiro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Utomo. Sedang 4 gedung itu yakni bangunan Pojok Beteng Keraton, Plengkung Wijilan, Plengkung Gading, dan Taman Adipura Kleringan.

"APK yang dimaksud dalam Perwal adalah benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program paslon. Termasuk simbol maupun tanda gambar paslon, dan bahan kampanye yang disebar ke masyarakat," kata Wawan.

Kawasan steril

Dia menambahkan selain di 4 gedung dan 7 ruas jalan itu, APK juga tak boleh dipasang di Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan Yogyakarta. Pun tempat umum seperti sekolah, tempat ibadah, puskesmas, hingga perguruan tinggi juga tak boleh terdapat APK.

"Badan jalan, tiang bendera milik pemerintah, tiang rambu lalu lintas, dan jembatan juga tidak diperbolehkan untuk memasang APK. Perwal ini akan kami sosialisasikan ke tim sukses," paparnya.

Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta, Agus Muhammad Yasin mengaku belum menerima salinan Perwal tentang APK tersebut. Meski demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU dan Pemkot Yogyakarta untuk mengawal aturan tersebut.

"Pengawasan melekat sesuai yang diatur dalam Perwal. Kalau ada yang melanggar, kami akan merekomendasikan Dinas Ketertiban supaya menindak," tukasnya. (mrf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005